



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/4852/2021  
TENTANG  
PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS  
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS  
ANGKATAN KETIGA BELAS TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik, perlu dilakukan upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia;
- b. bahwa upaya pemerataan pelayanan kesehatan spesialistik dilakukan melalui penempatan peserta dokter spesialis dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Ketiga Belas Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 705);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/174/2020 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS ANGKATAN KETIGA BELAS TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan peserta penempatan dokter spesialis dalam rangka pendayagunaan dokter spesialis angkatan ketiga belas Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Peserta sesuai dengan daftar nama dan lokasi penempatan Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas dokter spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anestesi dan terapi intensif, dan spesialis patologi klinik.

KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung; dan

b. penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung.

- KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berstatus ASN dan nonASN.
- KELIMA : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dengan status ASN sesuai dengan ketentuan instansi asal masing-masing.
- KETUJUHH : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dengan status nonASN selama 12 (dua belas) bulan.
- KEDELAPAN : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

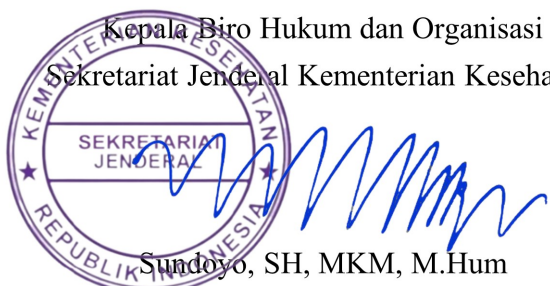
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2021

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  


Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/4852/2021  
TENTANG  
PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS  
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER  
SPESIALIS ANGKATAN KETIGA BELAS  
TAHUN 2021

DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN PESERTA PENEMPATAN  
DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER  
SPESIALIS ANGKATAN KETIGA BELAS TAHUN 2021

A. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Langsung

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Muhammad Iqbal, Sp.OG	RS Umum Daerah TGK Chik Ditiro Sigli	Pidie	Aceh	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
2	dr. Dwi Gustiarini, Sp.A	RS Umum Daerah Kab.Bangka Tengah	Bangka Tengah	Kepulauan Bangka Belitung	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
3	dr. Reza Surahmanto, Sp.PD	RS Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono	Belitung	Kepulauan Bangka Belitung	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
4	dr. Said Anshori, Sp.PD	RS Umum Daerah Kab.Bangka Tengah	Bangka Tengah	Kepulauan Bangka Belitung	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
5	dr. Iswahyudhi, Sp.PD	RS Umum Daerah Kab.Belitung Timur	Belitung Timur	Kepulauan Bangka Belitung	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
6	dr. Bahtiar Ahmad, Sp.An	RS Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara	Banjarnegara	Jawa Tengah	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
7	dr. Heni Handayani, Sp.An	RS Umum Daerah RAA Soewondo	Pati	Jawa Tengah	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
8	dr. Ady Sucipto, Sp.An	RS Umum Daerah Tugurejo Semarang	Kota Semarang	Jawa Tengah	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
9	dr. Maria Ulfa, Sp.A	RS Umum Daerah Nyi Ageng Serang	Kulon Progo	DI Yogyakarta	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
10	dr. Muhammad Imam Wahyudi, Sp.PD	RS Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar	Sumenep	Jawa Timur	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
11	dr. Made Minarti Witarini Dewi, Sp.PK	RS Umum Daerah Sanjiwani Gianyar	Gianyar	Bali	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
12	dr. I Putu Kusparta Aryadhi, Sp.OG	RS Umum Sumbawa Barat	Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
13	dr. Yuli Astika, Sp.A	RS Umum Daerah Kuala Pembuang	Seruyan	Kalimantan Tengah	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
14	dr. Bangkit Putrawan, Sp.A	RS Umum Daerah Inche Abdoel Moeis	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
15	dr. Benny Yafet Lalompoh, Sp.OG	RS Umum Daerah Talaud	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
16	dr. Muhammad Yunus, Sp.An	RS Umum Daerah KH. Hayyung Kepulauan Selayar	Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
17	dr. Idrus, Sp.PD	RS Umum Daerah Kabupaten Sinjai	Sinjai	Sulawesi Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
18	dr. Rakhmat Ilhamsyah, Sp.An	RS Bahteramas Provinsi Sultra	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
19	dr. Eva Kurnianti, Sp.OG	RS Umum Daerah Kabupaten Wakatobi	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
20	dr. Ady Asmar, Sp.An	RS Umum Daerah Maren Kota Tual	Kota Tual	Maluku	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
21	dr. Joseph Chandra Relmasira, Sp.OG	RS Umum Dr. M. Haulussy Ambon	Kota Ambon	Maluku	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan



No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
22	dr. Norma Pattinama, Sp.OG	RS Umum Daerah dr. Ishak Umarella	Maluku Tengah	Maluku	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
23	dr. Maria Kristianti Sari, Sp.A	RS Umum Daerah Tobelo	Halmahera Utara	Maluku Utara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
24	dr. Rusmelani Sain, Sp.A	RS Umum Daerah Raja Ampat	Raja Ampat	Papua Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
25	dr. Angelita Christine Kandio, Sp.OG	RS Umum Nabire	Nabire	Papua	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
26	dr. Dwi Rahayu Darusman, Sp.PD	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
27	dr. Aprilia Jati, Sp.PD	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
28	dr. Rio Yoga Erlambang, Sp.OG	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
29	dr. Anthonyus Gracius Bima Pakasi, Sp.OG	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

B. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus ASN

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Yudi Ichsan Ramata, Sp.B	RSUP Dr. M. Djamil	Kota Padang	Sumatera Barat	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
2	dr. Ferry Sudarsono, Sp.B	Pemerintah Kota Sukabumi	Kota Sukabumi	Jawa Barat	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
3	dr. Yanuar Priongo, Sp.OG	Pemerintah Kabupaten Sumenep	Sumenep	Jawa Timur	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
4	dr. Susilowati, Sp.A	RS Umum Daerah Kabupaten Tangerang	Kabupaten Tangerang	Banten	Sesuai dengan ketentuan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
					instansi asal
5	dr. Yonathan David Onibala, Sp.OG	RS Umum Dr. Sam Ratulangi	Minahasa	Sulawesi Utara	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
6	dr. Shally Cylviana Patodo, Sp.PD	RS Umum Daerah Undata Palu	Kota Palu	Sulawesi Tengah	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
7	dr. Muliati Arif, Sp.OG	RS Umum Daerah Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo	Wajo	Sulawesi Selatan	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
8	dr. Indrayani Irwan, Sp.OG	RS Umum Daerah Andi Djemma Masamba	Luwu Utara	Sulawesi Selatan	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
9	dr. Fransiscus Agustinus Wabia, Sp.PD	RS Umum Daerah Manokwari	Manokwari	Papua Barat	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
10	dr. Susianty Kosa, Sp.OG	RS Umum Nabire	Nabire	Papua	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
11	dr. Wenny Yaury, Sp.OG	RS Umum Daerah Kabupaten Mimika	Mimika	Papua	Sesuai dengan ketentuan instansi asal

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
12	dr. Eka Lydia Sari, Sp.OG	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Sesuai dengan ketentuan instansi asal

C. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus nonASN

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. San Winata Badiri, Sp.B	RSUD Tengku Sulung	Indragiri Hilir	Riau	12 bulan
2	dr. Mona Dwi Hardika, Sp.PD	RSU KH. Daud Arif	Tanjung Jabung Barat	Jambi	12 bulan
3	dr. Fandi Argiansya, Sp.A	RSUD Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang	Empat Lawang	Sumatera Selatan	12 bulan
4	dr. Diah Anggraini, Sp.A	RS Umum Daerah Ragab Begawe Caram	Mesuji	Lampung	12 bulan
5	dr. Prabowo Wirjodigdo Simbolon, Sp.B	RS Umum Daerah Ragab Begawe Caram	Mesuji	Lampung	12 bulan
6	dr. Ahmad Muhtadi, Sp.B	RSUD Dabo	Lingga	Kepulauan Riau	12 bulan
7	dr. Asri Parantri, Sp.A	RSUD Wonosari	Gunung Kidul	DI Yogyakarta	12 bulan
8	dr. Ida Bagus Putu Oka Mahendra, Sp.An	RSUD Umar Mas'ud	Gresik	Jawa Timur	12 bulan
9	dr. Pande Kadek Aditya Prayudi, Sp.OG	RSUD Kalabahi	Alor	Nusa Tenggara Timur	12 bulan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/Kota	Provinsi	Lama Penugasan
10	dr. Christya Lorena G., Sp.An	RSU Bajawa	Ngada	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
11	dr. Muh. Rezki Fadly Ilyas, Sp.B	RSUD Kab.Sekadau	Sekadau	Kalimantan Barat	12 bulan
12	dr. Maria Christine Florens Sandra, Sp.A	Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin 1	Kayong Utara	Kalimantan Barat	12 bulan
13	dr. Albert Winata, Sp.An	RSUD Muara Teweh	Barito Utara	Kalimantan Tengah	12 bulan
14	dr. John Jeffry Ginting, Sp.B	Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu	Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	12 bulan
15	dr. I Made Wisnu Wardhana, Sp.PD	RSUD Bolaang Mongondow Utara	Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara	12 bulan
16	dr. David Barends, Sp.B	RSUD Bolaang Mongondow Utara	Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara	12 bulan
17	dr. Wisnu Adryanto, Sp.PD	RSUD Trikora Salakan	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	12 bulan
18	dr. Muh. Kemal Putra, Sp.An	RSUD Batara Siang	Pangkajene Dan Kepulauan	Sulawesi Selatan	12 bulan
19	dr. Abram Pratama Tanuatmadja, Sp.PD	RSUD Kab. Buton Tengah	Buton Tengah	Sulawesi Tenggara	12 bulan
20	dr. Nurul Fuada, Sp.OG	RSUD Oتانaha Gorontalo	Kota Gorontalo	Gorontalo	12 bulan
21	dr. Benny Surya	RSUP Dr. J. Leimena	Kota Ambon	Maluku	12 bulan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/Kota	Provinsi	Lama Penugasan
	Moningka, Sp.OG				
22	dr. Heru Yudanto Boediman, Sp.B	RSUP Dr. J. Leimena	Kota Ambon	Maluku	12 bulan
23	dr. Dian Paramita, Sp.OG	RSU Oksibil	Pegunungan Bintang	Papua	12 bulan
24	dr. I Gusti Ngurah Arika Fermiawan, Sp.PD	RSU Oksibil	Pegunungan Bintang	Papua	12 bulan
25	dr. Armand Setiady Liwan, Sp.A	RSU Oksibil	Pegunungan Bintang	Papua	12 bulan

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002